

### **BAB III**

## **PERAN *GREENPEACE* DALAM MITIGASI LINGKUNGAN PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA**

Bab ini menggambarkan tentang bagaimana bentuk mitigasi yang dilakukan oleh *Greenpeace* terhadap kondisi hutan dan lahan di Indonesia dengan melakukan program kampanye agar publik juga turut serta dalam pelaksanaannya melalui program peta Kepo Hutan, *Tiger Challenge* dan pendekatan *High Carbon Stock*. Selanjutnya penulis juga memberikan gambaran mengenai dampak peranan tersebut terhadap lingkungan hidup di Indonesia.

### **3.1. Bentuk Mitigasi Lingkungan *Greenpeace* terhadap Hutan dan Lahan di Indonesia**

Upaya mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.<sup>1</sup> Resiko bencana yang dimaksud yaitu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang terjadi secara luas. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akan berdampak langsung terhadap lingkungan di sekitarnya yang akan menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai lingkup kehidupan.

Tujuan dilakukannya upaya mitigasi lingkungan untuk meminimalisir bencana kebakaran hutan dan lahan dengan memanfaatkan teknologi agar terjadi

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 6 PP. No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

pengelolaan yang tepat dan juga efisien.<sup>2</sup> Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak yang terkait pada sektor kehutanan di Indonesia yang tata kelola kehutanannya masih terkesan ditutupi atau kurangnya transparansi, membuat *Greenpeace* melakukan berbagai macam upaya untuk mendesak pemangku kepentingan di sektor ini agar transparan terhadap data-data kehutanan yang dibutuhkan oleh publik. Adapun upaya yang dilakukan *Greenpeace* seperti meluncurkan peta interaktif Kepo Hutan, *Tiger Challenge* dan juga pendekatan *High Carbon Stock* (HCS).

### 3.1.1. Peta Kepo Hutan

Belum terlaksananya kebijakan *One Map* yang semula dicanangkan pada tahun 2015, maka *Greenpeace* berinisiatif untuk meluncurkan peta yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di sektor kehutanan. Sebelum diluncurkannya peta interaktif tersebut, terlebih dahulu *Greenpeace* telah melakukan pengajuan permohonan keterbukaan informasi dan data-data peta hutan Indonesia namun ditolak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).<sup>3</sup> *Greenpeace* mengajukan perkara tersebut pada tanggal 8 September 2015 berdasarkan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Alexander Sutan, 2015, *Mitigasi dan Pelestarian Lingkungan*, diakses dalam <http://alexandersutan.lecture.ub.ac.id/files/2015/02/MITIGASI-DAN-PELESTARIAN-LINGKUNGAN.pptx> (19/8/2017, 8:22 WIB).

<sup>3</sup>Jui Purwoto, 2016, *Bukan Cuma Dora yang perlu Peta*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/bukan-cuma-dora-yang-perlu-peta/blog/55664/> (6/7/2017, 09:22 WIB).

<sup>4</sup> Siaran Pers *Greenpeace* Indonesia, 2015, *Keterbukaan Informasi adalah Kekuatan Rakyat untuk Menghentikan Kebakaran Hutan dan Lahan*, diakses dalam

Penolakan tersebut dikarenakan sebagian peta tidak bisa diakses karena belum adanya pemberharuan, ketidaklengkapan data pada peta serta data yang diminta merupakan data yang sifatnya tertutup.<sup>5</sup> Atas dasar UU No. 14 Tahun 2008 mengenai hak untuk tahu inilah *Greenpeace* meminta pemerintah agar membuka akses peta tersebut.<sup>6</sup> Hal tersebut dikarenakan yang menjadi korban akibat dari pembakaran hutan merupakan masyarakat luas bahkan melintasi batas negara yang dapat mengancam aktivitas perekonomian di suatu negara. Dengan demikian masyarakat pun harus tahu siapa saja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Adapun data-data yang diminta oleh *Greenpeace* kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diantaranya yaitu peta tutupan lahan Indonesia tahun 2012, peta tutupan lahan tahun 2013, izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanam Industri (HTI) berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015, izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015, izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, dan laporan hasil produksi provinsi sumber daya hutan dan dana reboisasi (PSDH DR) tahun 2000-2015. Semua data yang diminta tersebut dalam bentuk *shapefile*.<sup>7</sup>

---

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Keterbukaan-Informasi-Adalah-Kekuatan-Rakyat-untuk-Menghentikan-Kebakaran-Hutan-Dan-Lahan/> (15/8/2017, 8:22 WIB).

<sup>5</sup> Jui Purwoto, 2016, *Op.Cit.*

<sup>6</sup> *Q&A Greenpeace*, diakses dalam <https://www.kepoitubaik.com/> (7/5/2016, 07:55 WIB).

<sup>7</sup> Teguh Surya, 2016, *Riau Terbakar Lagi. Greenpeace mengambil Langkah Hukum untuk Mencegah Api Semakin Besar*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/riau-terbakar-lagi-greenpeace-mengambil-langk/blog/56862/> (15/8/2017, 10:53 WIB).

Format data dalam bentuk *shapefile* memiliki kelebihan antara lain, kecepatan dalam membaca kondisi ruang dan kemampuan mengedit gambar yang lebih cepat, membutuhkan lebih sedikit ruang penyimpanan. Selain itu, dengan format ini juga dapat menggabungkan data atau tumpang tindih data antara pemerintah ataupun data milik lembaga swasta.<sup>8</sup> Hasil analisis keruangan dengan format *shapefile* dapat menunjukkan berbagai informasi seperti, lokasi hutan yang sedang dibuka, lokasi kebakaran, wilayah konsesi secara nyata.<sup>9</sup> Sedangkan data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kebanyakan dalam format JPEG atau PDF, di mana dengan menggunakan format tersebut akan sulit untuk menganalisis data secara tepat.

Akhir tahun 2015 tepatnya di bulan September, *Greenpeace* Indonesia meluncurkan kampanye “Kepo<sup>10</sup> Itu Baik”.<sup>11</sup> Kampanye #kepoitubaik merupakan upaya untuk mengajak publik mengawasi tata kelola hutan dengan cara meminta transparansi data kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>12</sup> Kampanye ini sekaligus juga menjawab pertanyaan masyarakat mengapa *Greenpeace* sangat ingin mengetahui dan mengakses data pengelolaan hutan di Indonesia. Tujuan dari kampanye ini adalah mengajak agar masyarakat

---

<sup>8</sup>ESRI, 1998, *Esri Shapefile Technical Description*, diakses dalam <https://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf> (15/8/2017, 11:20 WIB).

<sup>9</sup>Teguh Surya, 2016, *Riau Terbakar Lagi. Greenpeace mengambil Langkah Hukum untuk Mencegah Api Semakin Besar*, *Op.Cit.*

<sup>10</sup> Kepo merupakan bahasa Hokkian yang berasal dari kata *keypoh* yang artinya ingin tahu. Kepo juga merupakan akronim dari *Knowing Every Particular Object*, diakses dalam <http://www.gogirl.id/news/life/kepo-is-it-good-or-bad-W04982.html> (8/11/2017, 13:22 WIB). Berdasarkan istilah tersebut *Greenpeace* menggunakan kata kepo hutan dalam menamakan peta interaktifnya tersebut dengan tujuan agar masyarakat yang ingin tahu mengenai hal-hal terkait informasi pada sektor kehutanan akan mendapatkan informasi dari peta tersebut.

<sup>11</sup>Teguh Surya, 2016, *Kita Berhak Tahu*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/kita-berhak-tahu/blog/55630/> (15/8/2017, 10:19 WIB).

<sup>12</sup> Siaran Pers *Greenpeace* Indonesia, 2015, *Op.Cit.*

menggunakan haknya untuk mengetahui informasi secara tepat mengenai pengelolaan hutan di Indonesia.

Kampanye ini telah mengajak ribuan pendukung dari berbagai kalangan seperti musisi, media sosial *influencers*, seniman, rumah produksi dan juga *online publisher* yang meminta keterbukaan akses data terhadap pengelolaan hutan di Indonesia.<sup>13</sup> Seperti gambar yang ditunjukkan di bawah ini yang menggambarkan kondisi hutan apabila informasi yang kita ingin ketahui sulit untuk didapatkan. Sebaliknya apabila informasi pemerintah di sektor kehutanan tersedia data secara rinci dan lengkap maka dapat membantu menjaga hutan kita yang tersisa.

**Gambar 3.1 Kondisi hutan dan lahan di Indonesia**



(Sumber: *Greenpeace* Indonesia)

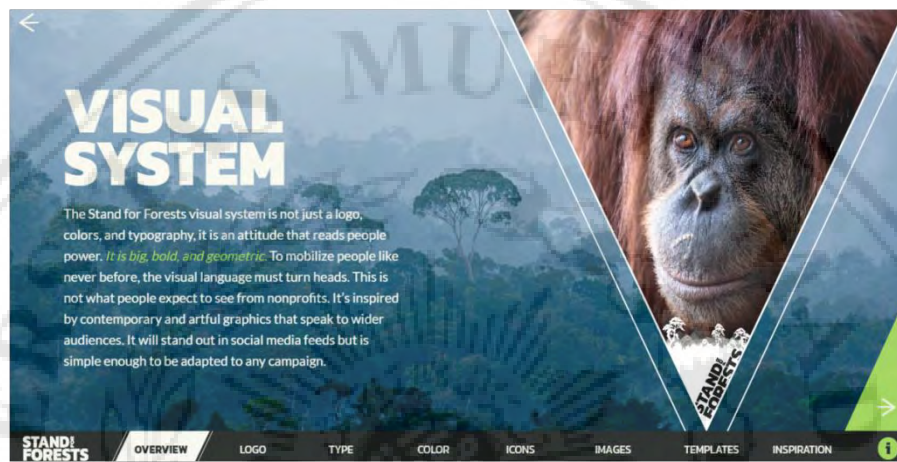
Dalam kampanyenya *Greenpeace* juga mengajak publik turut serta dalam kampanye perlindungan hutan di sosial media seperti memberikan dukungan dengan membagikan materi-materi kampanye #KepoItuBaik secara *online* dan mengisi petisi di laman website kepoitubaik.com. Adapun strategi materi-materi kampanye yang sering dibagikan oleh *Greenpeace* melalui sosial media ini berupa

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

visualisasi yang tidak hanya sebatas logo, warna ataupun tipografi yang menarik melainkan juga mampu mewakili apa yang dirasakan oleh masyarakat.<sup>14</sup> Gambar 3.2 berikut merupakan *style guide* materi kampanye visualisasi hutan oleh Greenpeace.

**Gambar 3.2 *Style Guide* untuk Kampanye Hutan Global**



(Sumber: Greenpeace Internasional)

Dalam gambar di atas terdapat panel yang terdiri dari logo, tipografi, warna, ikon, gambar, *templates* dan juga inspirasi. Pada tiap-tiap panel tersebut menjelaskan mengenai pedoman-pedoman berupa ukuran, warna, tipe font, ikon maupun gambar yang dapat dipilih untuk membuat materi kampanye. *Guidelines* ini bertujuan untuk merepresentasikan kampanye secara jelas dan konsisten.<sup>15</sup> Gambar 3.3 berikut ini merupakan salah satu materi kampanye serta *style guide*

<sup>14</sup> Greenpeace Internasional, *Stand for Forest Global Campaign Style Guide Greenpeace*, diakses dalam [https://secured-static.greenpeace.org/international/Global/international/code/2016/forests/style-guide/index.html?\\_ga=2.220713435.2134257102.1504627549-1417508567.1456825236](https://secured-static.greenpeace.org/international/Global/international/code/2016/forests/style-guide/index.html?_ga=2.220713435.2134257102.1504627549-1417508567.1456825236) (6/9/2017, 9:15 WIB).

<sup>15</sup> *Ibid.*



#kepoitubaik yang dibagikan oleh seorang relawan *Greenpeace*, Mardiyah Miller.<sup>16</sup>

**Gambar 3.3 Style Guide Kampanye Kepo Itu Baik**



(Sumber: Behance.net)

Keterbatasannya informasi dan transparansi dari berbagai pihak di sektor kehutanan menjadikan kampanye ini sangat penting karena data untuk publik masih sangat tertutup dan jauh dari akses publik. Hal ini dapat terlihat dari rekapitulasi permohonan informasi atas permohonan informasi publik periode Januari – Agustus 2014 seperti pada tabel 3.1 di bawah ini.

**Tabel 3.1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik atas Permohonan Informasi Publik Periode Januari – Agustus 2014.**

Jenis Data	Jumlah Pemohon	Jumlah Informasi yang diinginkan	Jumlah Pemohon (%)	Jumlah dijawab langsung (%)	Respon (tanpa keterangan)
Terkait administrasi/kelembagaan/hasil publikasi	5	46	11	35	20
Terkait perusahaan dan pengelolaan hutan	39	89	44	17	56

(Sumber: PPID Kementerian Kehutanan 2014 dalam *Press Briefing FWI* 2014)

<sup>16</sup> Materi Kampanye Kepo Itu Baik, diakses dalam <https://www.behance.net/gallery/30040785/kepo-itu-baik-campaign> (6/9/2017, 10:33 WIB).

Berdasarkan tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa data mengenai pengusahaan dan pengelolaan hutanlah yang banyak diajukan oleh para pemohon. Hal ini dikarenakan publik menginginkan kejelasan terkait tata kelola hutan agar dapat dijaga secara bersama-sama.<sup>17</sup> Dengan jumlah persentase dijawab langsung sebesar 17% dan sebanyak 56 informasi masih belum diketahui perkembangannya. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPDI) Kementerian Kehutanan di tahun 2014 masih kurang responsif terhadap permintaan informasi data yang diinginkan.

Selain terus mengupayakan transparansi dari pemerintah, *Greenpeace* bersama LSM Kalimantan Tengah, *Save Our Borneo* dan *Center for International Cooperation in Sustainable Management of Tropical Peatland* (CIMTROP)-UPT Universitas Palangkaraya juga melakukan pencegahan kebakaran hutan yang terus meluas yaitu dengan membangun sekat kanal gambut di daerah Paduran Sebangau, Kalimantan Tengah.<sup>18</sup> Penyekatan kanal ini berfungsi menjaga agar lahan gambut tidak mudah terbakar di musim kemarau.<sup>19</sup>

Lahan gambut merupakan lahan basah yang berperan sebagai penyangga<sup>20</sup> lingkungan.<sup>21</sup> Gambut menyimpan dan menyerap air selama musim hujan, ketika musim kemarau melepaskan air yang telah disimpannya.<sup>22</sup> Apabila di lahan

---

<sup>17</sup> *Press Briefing* FWI, 2014, diakses dalam [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Pers-Briefing\\_KIP\\_rev.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Pers-Briefing_KIP_rev.pdf) (11/9/2017, 1:36 WIB).

<sup>18</sup> Melani Pedro, 2015, *Dari Jakarta, Paduran, Paris, semua Kepo!*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/dari-jakarta-paduran-paris-semua-kepo/blog/55133/> (15/8/2017, 12:41 WIB).

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Penyangga merupakan wilayah tempat penyimpanan sementara. Dalam hal ini penyimpanan yang dimaksud yaitu penyimpanan air.

<sup>21</sup> Muhammad Noor, 2001, *Pertanian Lahan Gambut: Potensi dan Kendala*, Yogyakarta: Kanisus, hal. 5.

<sup>22</sup> *Ibid.*



gambut dilakukan pengeringan, sifatnya yang semula hidrofil (menyukai air) maka akan menjadi hidrofob (tidak menyukai air).<sup>23</sup> Akibat lahan gambut yang kering inilah yang membuat lahan gambut menjadi mudah terbakar. Gambut juga memiliki kemampuan dalam menyerap karbon dengan jumlah yang cukup besar, dimana hal ini dapat membatasi lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer.<sup>24</sup>

Atas permasalahan inilah *Greenpeace* meluncurkan peta interaktif Kepo Hutan sebagai sarana publik yang butuh akan informasi terkait data kehutanan di Indonesia. Peta kepo hutan merupakan sebuah *platform* yang menyediakan kumpulan data konsesi dari berbagai sumber terkait perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara serta kawasan hutan.<sup>25</sup> Program *Greenpeace* Indonesia dalam upaya agar pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan Kebijakan *One Map* dengan meluncurkan peta interaktif “Kepo Hutan” (Ingin tahu tentang Hutan). Program ini dilaksanakan untuk memberikan transparansi data peta hutan Indonesia yang tidak kunjung dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, *Greenpeace* Indonesia berupaya memberikan informasi kepada publik agar hutan di Indonesia dapat diawasi dan dilindungi bersama.

Peta yang diluncurkan oleh *Greenpeace* pada tahun 2016 tersebut membantu masyarakat khususnya yang berada di sekitar hutan agar selalu waspada terhadap

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> W. C. Adinugroho, dkk, 2005, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut, Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*, Bogor: Wetlands Internasional-Indonesia, hal. 6.

<sup>25</sup> Siaran Pers *Greenpeace* Indonesia, 2016, *Greenpeace Luncurkan Peta yang Ungkap Siapa Pemegang Konsesi di Lahan Kebakaran*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Greenpeace-Luncurkan-Peta-yang-Ungkap-Siapa-Pemegang-Konsesi-di-Lahan-Kebakaran/> (7/5/2016, 07:26 WIB).

<sup>26</sup> Teguh Surya, 2016, *Membuka Peta untuk Membangun Transparansi Pengelolaan Hutan Indonesia*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/membuka-peta-hutan-untuk-transparansi/blog/55876/> (6/7/2017, 09:55 WIB).

situasi yang sebenarnya terjadi di hutan agar hutan yang masih tersisa dapat dijaga dari kebakaran.<sup>27</sup> Peta tersebut juga membantu mencegah terjadinya peristiwa pembakaran hutan yang besar-besaran dengan menunjukkan data yang akurat dan terkini tentang kebakaran yang sedang terjadi.<sup>28</sup> Selain itu juga mengetahui tentang siapa yang bertanggung jawab untuk menghentikan kebakaran tersebut. Peta ini dapat diakses melalui laman [greenpeace.org/kepohutan](http://greenpeace.org/kepohutan).

**Gambar 3.4 Peta Interaktif Kepo Hutan**



(Sumber: *Greenpeace Indonesia*)

Dalam gambar di atas terlihat bahwa terdapat panel lapisan peta di sebelah kiri. Panel tersebut dapat di non-aktifkan sesuai dengan informasi yang kita ingin cari. Warna yang tertera pada tampilan gambar di atas menunjukkan panel yang sedang diaktifkan yaitu panel perkebunan kelapa sawit, tutupan lahan serta panel titik kebakaran aktif. Tiap-tiap panel memiliki warna-warna yang berbeda untuk mempermudah proses identifikasi.

<sup>27</sup> Siaran Pers *Greenpeace Indonesia*, 2016, *Op.Cit.*

<sup>28</sup> Teguh Surya, 2016, *Kita Berhak Tahu!*, *Op. Cit.*

Panel tersebut terdiri dari peta perkebunan kelapa sawit, peta konsesi bubur kertas dan kayu, peta Hak Pengusahaan Hutan, peta konsesi batubara, peta habitat orangutan, peta wilayah konservasi harimau, peta tutupan lahan yang terdiri dari data hutan dan non-hutan, peta daerah moratorium, titik kebakaran aktif yang diperbaharui secara harian, peta lahan gambut, peringatan pembukaan lahan bulanan, arsip titik api di Indonesia dari tahun 2013, serta peringatan *Global Land Analysis and Discovery* (GLAD) yaitu pemberitahuan tentang lokasi pohon-pohon yang ditebang dan diketahui setidaknya seminggu setelah dilakukan penebangan.<sup>29</sup>

Peta interaktif ini dirancang menggunakan teknologi *open source*<sup>30</sup> dari *Global Forest Watch* selaku penyedia layanan pemetaan dengan sistem pemantauan *online* dan peringatan terhadap hutan secara interaktif yang menyediakan kumpulan data dari perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan perusahaan kayu alam serta izin pertambangan batu bara.<sup>31</sup> Selain itu, data yang dimiliki oleh *Greenpeace* juga disandingkan dengan data-data yang tersedia pada *platform* informasi seperti data titik api, jenis tutupan hutan dan ke dalam gambut, deforestasi, serta sebaran habitat orangutan dan harimau.<sup>32</sup> Peta ini

---

<sup>29</sup> Siaran Pers *Greenpeace* Indonesia, 2016, *Op. Cit.*

<sup>30</sup> Teknologi *open source* merupakan metode melalui perangkat lunak seperti Mozilla Firefox, *Open Office*, dan lain sebagainya, yang dilakukan oleh pengembang perangkat tersebut agar dapat didistribusikan secara gratis karena bersifat terbuka dalam Ferrianto Gozali dan Billion Lo, *Pemanfaatan Teknologi Open Source dalam Pengembangan Proses Belajar Jarak Jauh di Perguruan Tinggi*, Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika, Vol.1, No.1, Maret 2012, Universitas Trisakti, hal. 48, diakses dalam <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/janapati/article/view/9767> (1/10/2017, 22:12 WIB).

<sup>31</sup> Siaran Pers *Greenpeace* Indonesia, 2016, *Op. Cit.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

juga menyediakan akses informasi pada tingkat grup pemegang kepentingan dan juga konsesi individu.<sup>33</sup>

Meskipun data yang dimiliki oleh *Greenpeace* terbilang cukup lengkap namun ada beberapa kelemahan dari peta interaktif ini yaitu data konsesi yang didapat merupakan data yang sudah lama dan data yang tidak resmi karena diperoleh dari salinan berbagai sumber.<sup>34</sup> Oleh karena itu *Greenpeace* mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam sektor kehutanan ini segera memperbaharui data-data yang mereka miliki untuk membantu menyempurnakan data. Selain itu juga pemerintah hendaknya menyediakan akses bebas terhadap data konsesi agar mudah dilakukan analisis oleh pengamat lingkungan.<sup>35</sup>

Dengan diluncurkannya peta tersebut, *Greenpeace* berharap akan membantu pengawasan secara demokratis, dapat menemukan perusahaan yang terlibat atas kebakaran negara tahun 2015 untuk dimintai pertanggung jawabannya, mendorong pemegang konsesi perkebunan untuk berani mempublikasikan peta konsesi mereka dan menjadikan peta interaktif Kepo Hutan ini sebagai standar inisiatif terhadap kebijakan *One Map* milik pemerintah ke depannya.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Briefer *Greenpeace*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/722339/Kepo%20Hutan%20Briefer%20-%20Bhs%20Indonesia.pdf> (24/4/2016, 6:37 WIB).

<sup>34</sup> *Greenpeace* Indonesia, *Kepo Hutan: Lindungi Hutan dengan Keterbukaan Informasi*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/Indonesia/Code/Forest-Map/about.html> (19/8/2017, 8:36 WIB).

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Briefer Greenpeace*, 2016, *Op.Cit.*

### 3.1.2. *Tiger Challenge*

Program *Tiger Challenge* merupakan program untuk memastikan agar rantai pasokan minyak kelapa sawit yang dibeli atau diolah oleh perusahaan terbebas dari kerusakan hutan agar menjadi ramah terhadap satwa khususnya harimau.<sup>37</sup> *Tiger Challenge* merupakan salah satu program yang diluncurkan terkait dengan kampanye dan juga petisi *Protect Paradise*. Kampanye *Protect Paradise* ini merupakan sebuah kampanye yang bertujuan untuk menghentikan kerusakan yang menjadi habitat satwa seperti harimau yang terjadi di hutan Sumatera.<sup>38</sup> Kampanye ini dilakukan dengan cara petisi dan juga perjalanan secara langsung di hutan Riau.<sup>39</sup>

Inisiatif *Tiger Challenge* ini diluncurkan pada tahun 2013 sebagai bentuk transparansi pengungkapan konsumen minyak kelapa sawit tingkat global mana saja yang memasok rantai kelapa sawit yang terbebas dari pengrusakan hutan.<sup>40</sup> Tantangan ini ditujukan kepada perusahaan yang berada pada sektor kelapa sawit terbesar yang ada di seluruh dunia, di mana Indonesia sebagai salah satu negara pemasok kelapa sawit tersebut.

Terdapat 5 kriteria tantangan yang diterapkan oleh *Greenpeace* terkait kepastian yang dilakukan perusahaan agar tidak terlibat dalam perusakan hutan,

---

<sup>37</sup> Areeba Hamid, 2013, *Who Will be the Next to Take the Tiger Challenge?*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/usa/three-major-companies-commit-to-sustainable-palm-oil-sourcing-will-other-industry-giants-follow/> (6/9/2017, 12:33 WIB).

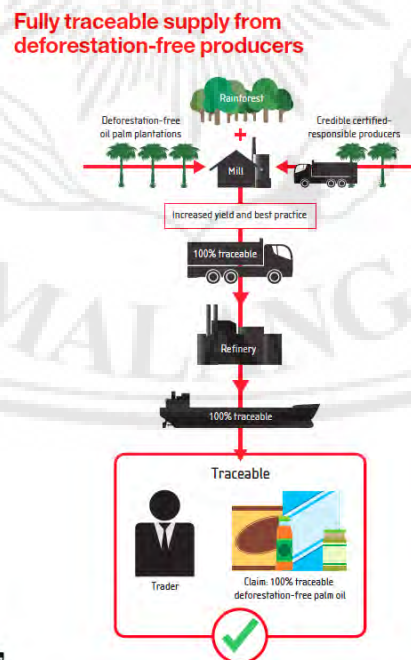
<sup>38</sup> Gorga Hutagaol dan Rack Digital, *Panggilan Melindungi Hutan*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/panggilan-melindungi-hutan/blog/48823/> (29/07/2017, 8:43 WIB).

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Greenpeace* Indonesia, *Tiger Challenge*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/melindungi-hutan-alam-terakhir/Tiger-Challenge/> (29/07/2017, 8:50 WIB).

yaitu kebijakan, keterlacakan, penjadwalan, transparansi dan implementasi.<sup>41</sup> Mengenai kriteria kebijakan, *Greenpeace* memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini harus memiliki kebijakan nol deforestasi yang tersedia untuk publik. Kriteria keterlacakan, perusahaan harus melacak pemasok rantai kelapa sawit hingga ke tingkat perkebunan. Kriteria penjadwalan yaitu perusahaan harus memiliki target waktu dalam mencapai nol deforestasi tersebut. Kriteria transparansi yaitu perusahaan harus mampu melaporkan dan memberikan data perkembangan terhadap kebijakan tersebut secara transparan. Kriteria implementasi yaitu perusahaan harus mampu menerapkan kebijakan tersebut bersama dengan para pemasok kelapa sawit mereka dan memberikan apresiasi terhadap pemasok yang telah melaksanakan sesuai dengan proses penanaman yang bertanggung jawab.

**Gambar 3.5 Skema Keterlacakan Pasokan Kelapa Sawit**



(Sumber: *Greenpeace USA*)

<sup>41</sup> *Ibid.*



Gambar 3.5 di atas menunjukkan skema pengolahan kelapa sawit mulai dari proses pemanenan lalu dibawa ke pabrik penggilingan minyak kelapa sawit mentah untuk didistribusikan ke beberapa kilang minyak masing-masing perusahaan untuk diolah menjadi produk minyak kelapa sawit siap pakai. Kemudian minyak kelapa sawit yang siap untuk dipasarkan didistribusikan lagi keseluruh pemasok ataupun pembelinya seperti beberapa perusahaan konsumen minyak kelapa sawit pada gambar 3.6 di bawah. Apabila kriteria keterlacakan tersebut dari hulu hingga ke hilir serta proses yang sesuai dengan standar kriteria tanpa merusak lingkungan terlaksana dan terlacak secara baik oleh pihak penyedia kelapa sawit maupun perusahaan pembeli olahan minyak kelapa sawit, maka produk yang digunakan masyarakat sehari-hari terbebas dari pengrusakan hutan.

Perusahaan yang merespon *Tiger Challenge* yang dilakukan oleh *Greenpeace* di tahun 2013 yaitu *Procter & Gamble* (P&G), Colgate Palmolive, Ferrero, General Mills, Godrej, Johnson & Johnson, Kao, Kellogg's, Liby, L'Oréal, Mars, Mondelē International, Nestlé, Nice, PepsiCo, Reckitt Benckiser dan Unilever.<sup>42</sup> Meskipun kebanyakan dari perusahaan ini sebagai anggota dari RSPO, namun standar RSPO sendirilah yang terkadang gagal dalam upaya mengurangi kerusakan hutan. Perusahaan konsumen terkemuka ini tidak seluruhnya berlabel *forest friendly* seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.6 di bawah ini.

---

<sup>42</sup>*Tiger Challenge, Op.Cit.*

**Gambar 3.6 Perusahaan yang telah merespon *Tiger Challenge***



(Sumber: *Greenpeace USA*)

Akibat masih banyaknya perusahaan konsumen besar yang masih melakukan praktik kotor terhadap rantai pasokan kelapa sawit. Maka *Greenpeace* terus mendesak agar perusahaan yang masih berlabel *non-forest friendly* ini segera berkomitmen untuk nol deforestasi terhadap proses pasokan kelapa sawit yang mereka lakukan. Tahun 2014, *Greenpeace* bersama dengan masyarakat dunia berhasil menekan beberapa perusahaan besar ini melalui petisi via *e-mail* yang dikirimkan langsung kepada perusahaan yang dituju seperti P&G, J&J dan Mondelez. Seperti yang ditunjukan dalam gambar di bawah ini beberapa aksi yang dilakukan oleh para relawan *Greenpeace*.

**Gambar 3.7 Berbagai Aksi yang ditujukan kepada perusahaan *Procter & Gamble (P&G)***



(Sumber: *Greenpeace Internasional*)

Sekitar 400.000 ribu orang di seluruh dunia terlibat dalam aksi protes terhadap P&G, aksi protes juga dilakukan di kantor *headquarters* P&G di Cincinnati, Ohio yang menarik perhatian dunia internasional.<sup>43</sup> Dalam aksinya ini, *Greenpeace* berhasil mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk juga turut bertindak sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pencegahan lingkungan. Pencapaian yang dilakukan oleh *Greenpeace* ini dalam melobi kebijakan lingkungan yang diambil oleh P&G menandakan bahwa kekuatan dan tekanan publik dapat membawa pengaruh yang cukup besar dalam suatu perubahan kebijakan. Namun, hal ini tidak menjadikan *Greenpeace* berhenti melakukan pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan yang telah berkomitmen terhadap nol-deforestasi ini. *Greenpeace* tetap melakukan pengawasan terhadap

<sup>43</sup> Areeba Hamid, 2014, *Consumer Power! Procter & Gamble Decides to Wash Its Bad Palm Oil Away*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/procter-gamble-commits-to-no-deforestation/blog/48849/> (24/8/2017, 13:34 WIB).

perusahaan tersebut guna kebijakan yang mereka lakukan dapat terimplementasi dengan baik.

**Gambar 3.8 Perkembangan *Tiger Challenge* di tahun 2014.**



(Sumber: *Greenpeace* Indonesia)

Gambar diatas menunjukkan akibat adanya tekanan dari publik selaku konsumen pengguna produk yang mereka keluarkan memiliki *concern* yang sama dengan *Greenpeace*. Sehingga publik beserta organisasi lingkungan lainnya mampu mendorong perusahaan yang mulanya tidak berkomitmen terhadap nol-deforestasi menjadi berkomitmen terhadap kelestarian hutan di Indonesia. Hal ini terlihat dari berpindahnya perusahaan P&G dan J&J yang mulanya berlabel *non forest-friendly* ke arah *forest-friendly* di tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2015, *Greenpeace* kembali melakukan survei kepada perusahaan-perusahaan yang berkomitmen terhadap kebijakan nol-deforestasi. Tetapi pada kenyataannya, dari 14 perusahaan yang memiliki kebijakan nol-deforestasi hanya 2 perusahaan saja yang berkomitmen tinggi terhadap kebijakannya tersebut. Hal ini terlihat dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 3.9 Scorecard Perusahaan dengan Kebijakan Nol-Deforestasi**



(Sumber: Greenpeace USA)

Gambar di atas menunjukkan bahwa hanya 2 perusahaan saja yang mampu berkomitmen terhadap kebijakan nol-deforestasi mereka. Masih banyak perusahaan yang belum mencapai *forests friendly*. Pengkategorian yang dilakukan Greenpeace dalam gambar di atas menitikberatkan pada kriteria keterlacakan atau sumber yang bertanggung jawab.<sup>44</sup> Meskipun kriteria lain juga sangat penting dalam penilaian, menitikberatkan dalam kriteria keterlacakan hal ini dikarenakan masih banyak perusahaan yang enggan untuk mempublikasikan data-data rantai pasokan dari mana minyak kelapa sawit yang mereka beli.<sup>45</sup> Gambar berikut

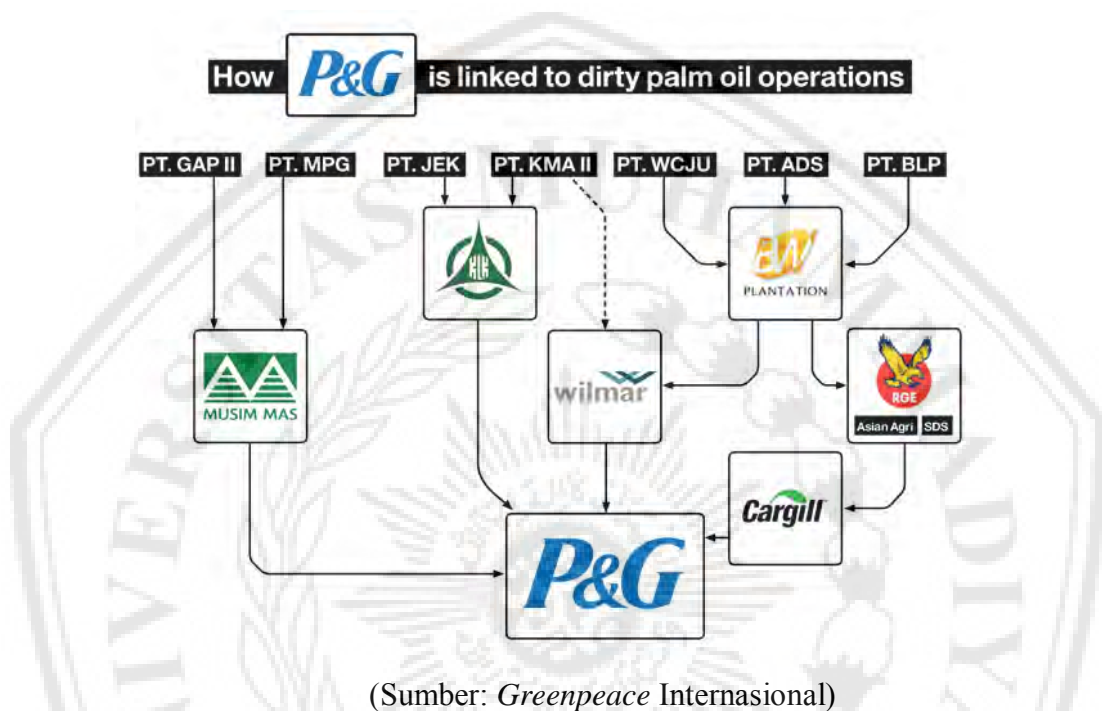
<sup>44</sup> Laporan Greenpeace International, 2016, *Cutting Deforestation Out of The Palm Oil Supply Chain: Company Scorecard*, hal.5, diakses dalam [http://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2016/03/gp\\_IND\\_PalmScorecard\\_FINAL.pdf](http://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2016/03/gp_IND_PalmScorecard_FINAL.pdf) (30/8/2017, 6:47 WIB).

<sup>45</sup> *Ibid.*



merupakan skema bagaimana perusahaan barang konsumsi global bisa terlibat dalam praktik kerusakan hutan.

**Gambar 3.10 Alur Pasokan Minyak Kelapa Sawit dari Perkebunan hingga ke Produsen Barang Konsumsi**



(Sumber: *Greenpeace* Internasional)

Gambar 3.10 di atas menunjukkan salah satu contoh bagaimana perusahaan konsumsi barang dapat terlibat dalam proses pengrusakan hutan. Suplai minyak kelapa sawit yang didapatkan dari pemasok yang dalam praktik pengolahan minyak sawitnya masih terkait dengan praktik yang tidak sesuai dengan standar. Mulai dari praktik pembukaan lahan dengan cara tebang-bakar yang menyebabkan bencana asap dan juga hilangnya flora maupun fauna yang berada di wilayah konsesi serta melakukan pembukaan lahan di wilayah gambut yang banyak menyimpan cadangan karbon.

Oleh karena itu, *Greenpeace* menawarkan beberapa solusi kepada perusahaan-perusahaan yang masih terkait dengan rantai pasokan kelapa sawit



yang tidak bertanggung jawab. Solusi tersebut seperti ketersediaan para perusahaan dalam penerapan *no deforestation* dengan mengharuskan pemasok menggunakan pendekatan stok karbon tinggi atau metode yang sama kuatnya dalam penerapan praktik pengolahannya di lapangan serta tidak mengembangkan di lahan gambut, mempublikasikan rencana terkait penerapan kebijakan *no deforestation*, mewajibkan para pemasok/*suppliers* dan pihak ketiga untuk mempublikasikan peta konsesi dalam praktik rantai pasokan mereka, berkomitmen untuk meyakinkan para pemasok dalam mengambil tindakan agar sesuai dengan kebijakan *no deforestation* pada level grup seperti RSPO, dan bekerja sama dengan pemasok dan pemangku kepentingan dalam perencanaan membantu melindungi dari kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia.<sup>46</sup>

Seperti uraian di atas, kampanye kepada korporasi-korporasi merupakan salah satu strategi kampanye hutan secara global yang dilakukan oleh *Greenpeace* dan berhasil menekan perubahan perilaku korporasi selama 15 tahun pelaksanaannya.<sup>47</sup> Tekanan yang diberikan oleh konsumen pengguna produk akhir mereka setidaknya mampu menghentikan keterlibatan korporasi dalam rantai penghancuran hutan. Apabila kampanye terhadap korporasi berhasil merubah perilaku mereka, maka *Greenpeace* selanjutnya memastikan agar pengimplementasian di lapangan terlaksana sesuai dengan standar RSPO.

Oleh sebab itu, transparansi merupakan kunci penting dalam melihat perkembangan yang dilakukan oleh masing-masing korporasi. Hal ini dikarenakan

---

<sup>46</sup> Laporan *Greenpeace* International, 2016, *Op. Cit*, hal. 15.

<sup>47</sup> Longgena Ginting, *Bagaimana Cara Greenpeace Melawan Asap?*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/bagaimana-cara-greenpeace-melawan-asap/blog/54626/> (9/9/2017, 9:51 WIB).

apabila mereka mempublikasikan laporan-laporan perkembangannya, masyarakat maupun organisasi pemerhati lingkungan akan mampu mengawasi pencapaian pelaksanaan komitmen terhadap nol deforestasi. Jadi, penekanan yang dilakukan masyarakat selaku konsumen, NGO, serta kelompok bisnis ini juga akan mampu melakukan perubahan politik karena hukum dan kebijakan dapat melindungi hutan sebagai solusi jangka panjang.<sup>48</sup>

Kampanye terhadap pemerintah Indonesia juga dilakukan sebagai upaya untuk memastikan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat melindungi hutan dan lahan di Indonesia.<sup>49</sup> Perbaikan tata kelola hutan oleh pemerintah dengan mengeluarkan produk hukum yang kuat akan mampu melindungi hutan Indonesia yang tiap tahunnya mengalami penurunan jumlah. Produk hukum yang dikeluarkan nantinya juga diharapkan agar dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat maupun lokal sekitar hutan, agar mereka secara bersama-sama juga dapat melindungi hutan dan berkontribusi dalam membantu menghentikan pengrusakan terhadap hutan dan lahan di Indonesia.<sup>50</sup>

### **3.1.3. Pendekatan *High Carbon Stock* (HCS)**

Pendekatan HCS ini merupakan suatu metode untuk membedakan lahan hutan yang masih memiliki stok karbon paling banyak dengan yang sudah terdegradasi agar dapat memaksimalkan lahan mana yang masih dapat dikonservasi dan lahan

---

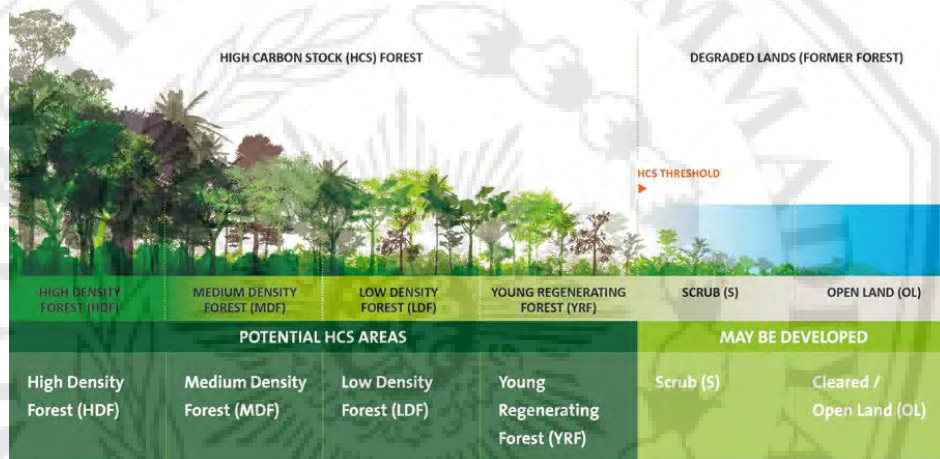
<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

mana yang dapat dikembangkan menjadi wilayah perkebunan.<sup>51</sup> Metode ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi kelompok yang berkomitmen mengurangi deforestasi dengan tetap menghormati hak dan kehidupan masyarakat sekitar dengan tetap menerapkan praktik yang transparan, kuat dan dapat dipercaya secara ilmiah.<sup>52</sup> Pendekatan HCS ini membedakan lahan hutan menjadi enam vegetasi seperti gambar di bawah ini.

**Gambar 3.11 Tingkat Vegetasi Lahan dalam Pendekatan HCS**



(Sumber: High Carbon Stock)

Dalam gambar di atas lahan hutan yang ada dibedakan menjadi enam vegetasi lahan yang berbeda berdasarkan analisis data satelit dan pengukuran langsung di lapangan. Lahan yang termasuk dalam vegetasi *Scrub* (semak belukar/S) dan lahan terbuka (OL) merupakan lahan yang memiliki jumlah stok karbon yang rendah antara 15-20 ton jumlah karbon sehingga pada lahan vegetasi ini dapat

<sup>51</sup> *The High Carbon Stock Approach*, diakses dalam <http://highcarbonstock.org/the-high-carbon-stock-approach/> (15/9/2017, 3:40 WIB).

<sup>52</sup> *Ibid.*

dikembangkan menjadi area perkebunan.<sup>53</sup> Sedangkan pada vegetasi lahan *High Density Forest* (HDF), *Medium Density Forest* (MDF), *Low Density Forest* (LDF), dan *Young Regenerating Forest* (YRF) berpotensi memiliki stok karbon yang melimpah dengan jumlah antara 70-250 ton karbon.<sup>54</sup> Jadi sangat rawan jika dilakukan pembukaan lahan perkebunan pada lahan vegetasi tersebut. Perbedaan lahan vegetasi tersebutlah yang digunakan untuk mengidentifikasi perencanaan dalam pelestarian kawasan hutan.

Pendekatan HCS ini dilakukan mulai dari tahun 2011 oleh *Golden Agri-Resources Limited* (GAR), PT. SMART Tbk., yang bekerjasama dengan *The Forest Trust* (TFT) dan *Greenpeace* namun masih hanya sebatas penelitian, pengumpulan dan penyusunan data.<sup>55</sup> Pada tahun 2015 baru lah koalisi ini mempublikasikan *toolkit* Pendekatan HCS agar dapat diimplementasikan di lahan perkebunan kelapa sawit dan konsesi *pulp and paper*. Kemudian di tahun 2017 *toolkit* Pendekatan HCS versi kedua ini diluncurkan lagi sebagai metodologi global dalam praktik non-deforestasi bagi perusahaan, masyarakat, maupun institusi yang telah berkomitmen terhadap nol-deforestasi.<sup>56</sup>

*Toolkit* pendekatan HCS ini merupakan suatu panduan yang digunakan oleh praktisi untuk memastikan bahwa tidak ada pembukaan lahan atau perluasan lahan

---

<sup>53</sup> Annisa Rahmawati, *Bagaimana Melakukan Nol Deforestasi*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/bagaimana-melakukan-nol-deforestasi/blog/52526/> (15/9/2017, 4:12 WIB).

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> HCS Briefing 2013, *Identifying High Carbon Stock (HCS) Forest for Protection*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/forests/2013/HCS-Briefing-2013.pdf> (15/9/2017, 4:27 WIB).

<sup>56</sup> Siaran Pers *Greenpeace* Indonesia, 2017, *Metodologi Global untuk Menerapkan Praktek Non Deforestasi*, diakses dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Metodologi-global-untuk-menerapkan-praktek-Non-Deforestasi/> (15/9/2017, 4:40 WIB).

pada wilayah konsesi.<sup>57</sup> Penggabungan yang dilakukan oleh para analis seperti analisis hak kepemilikan lahan dan pemetaan hingga analisis citra satelit, perencanaan hutan dan pengkaji keanekaragaman hayati dalam perencanaan pemanfaatan lahan secara keseluruhan diharapkan mendapat hasil yang baik.<sup>58</sup> Tahapan dari *toolkit* versi pertama ini yaitu dalam konteks sosial melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan yang berada di sekitar areal lahan hutan dalam perencanaan pemanfaatan lahan, pada tahap berikutnya yaitu melakukan pembuatan peta indikatif hutan HCS pertama dengan cara pengklasifikasian vegetasi lahan seperti gambar 3.12 melalui citra satelit setelah itu dilakukan pengambilan sampel di lapangan atas pengklasifikasian tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu pengembangan analisis peta indikatif melalui analisis konservasi petak hutan dan tahap akhir yaitu *decision tree*.<sup>59</sup>

Berikut ini merupakan contoh identifikasi HCS di wilayah PT. Tekukur Indah dengan luas lahan 2.890,3 ha terletak di Kecamatan Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur.<sup>60</sup> Sebelum lahan tersebut berpindah kepemilikan untuk PT. Tekukur Indah, lahan tersebut merupakan lahan pengembangan yang dikelola oleh Desa Labanan Jaya, Labanan Makmur dan Labanan Makarti. Berdasarkan SK Bupati Berau No. 108 Tahun 2012, perkebunan kelapa sawit milik PT tersebut diusulkan untuk dikembangkan menjadi area untuk perkebunan utama kelapa

---

<sup>57</sup> HCS Approach Steering Group, 2015, *The HCS Approach Toolkit: Version 1.0*, hal. 9, diakses dalam [http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2014/12/HCS-TK\\_2015\\_BAHASA\\_FULLNEW.pdf](http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2014/12/HCS-TK_2015_BAHASA_FULLNEW.pdf) (22/9/2017, 7:46 WIB).

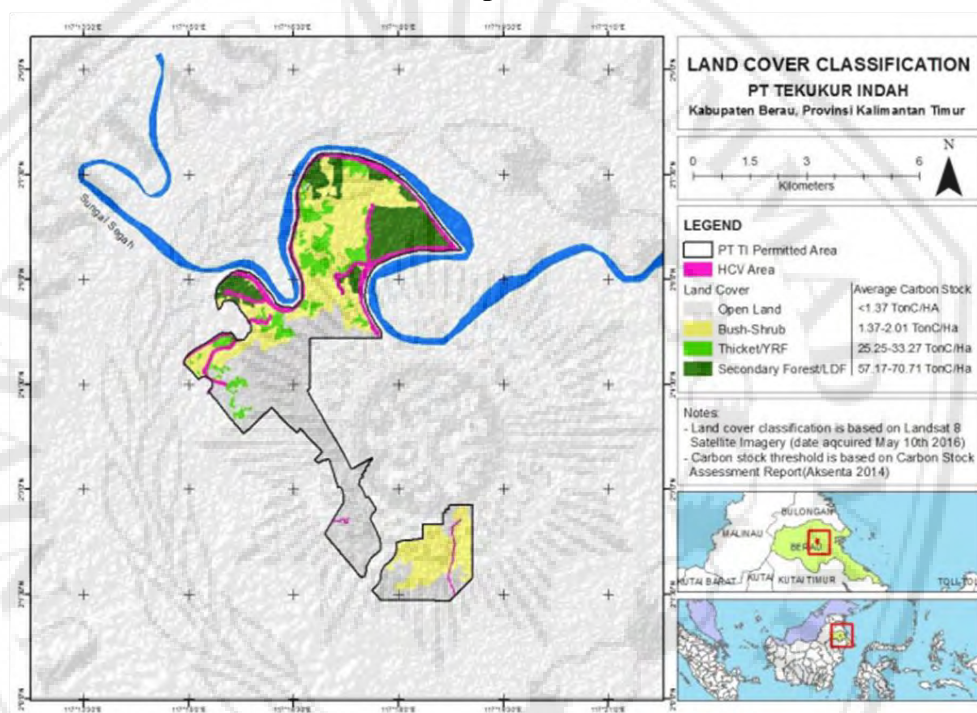
<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 9.

<sup>59</sup> *Ibid*.

<sup>60</sup> Laporan HCS, *Summary Report Submitted for Approac Peer Review Process*, diakses dalam [http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2016/07/PT-Tekukur-Indah-KLK\\_-HCS-Assessment-Summary-Report\\_21112016\\_Final-for-HCSA-Website.pdf](http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2016/07/PT-Tekukur-Indah-KLK_-HCS-Assessment-Summary-Report_21112016_Final-for-HCSA-Website.pdf) (26/9/2017, 4:59 WIB).

sawit dan untuk dijadikan wilayah perkebunan kemitraan untuk para petani yang berada di sekitar area tersebut.<sup>61</sup> Oleh sebab itu perusahaan tersebut melakukan rencana penggunaan lahan menggunakan metode pendekatan HCS agar dapat menggunakan lahan secara maksimal. Di bawah ini merupakan gambar peta tutupan lahan berdasarkan identifikasi HCS.

**Gambar 3.12 Klasifikasi Tutupan Lahan PT. Tekukur Indah**



(Sumber: High Carbon Stock)

Berdasarkan gambar 3.12 di atas, klasifikasi tutupan lahan yang berada di PT. Tekukur Indah terdapat 4 vegetasi kelas yaitu lahan terbuka yang ditunjukkan dengan warna abu-abu dengan luas 40,99%, vegetasi semak ditandai dengan warna kuning sebanyak 35,50%, vegetasi *Young Regenerating Forest* (YRF) ditandai dengan warna hijau muda sebanyak 9,71% dan *Low Density Forest*

<sup>61</sup> *Ibid.*



(LDF) ditandai dengan warna hijau tua sebanyak 13,80% dari total konsesi.<sup>62</sup> Dengan menganalisis vegetasi berdasarkan citra satelit tersebut, para praktisi yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya kemudian mengambil sampel di lapangan dan mengidentifikasi apakah sudah sesuai dengan analisis citra satelit lalu melakukan *decision tree* atau penghitungan berdasarkan diameter pohon. Hasil dari identifikasi berdasarkan pendekatan HCS nantinya dapat diketahui vegetasi lahan mana saja yang dapat di konservasi maupun yang dapat dikembangkan bersama untuk lahan perkebunan.

### **3.2. Dampak Program *Greenpeace* berdasarkan Peran dalam Mitigasi**

Upaya *Greenpeace* dalam meluncurkan peta Kepo Hutan, *Tiger Challenge* dan pendekatan HCS yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa *Greenpeace* berperan dalam upaya mitigasi lingkungan khususnya pada kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Hal ini dikarenakan peta yang dikeluarkan oleh *Greenpeace* bertujuan untuk memberikan informasi terkini mengenai data titik api di lapangan. Data mengenai titik api tersebut dapat dideteksi dalam 24, 48 atau 72 jam terakhir.<sup>63</sup> Sehingga apabila data tersebut sudah diketahui maka sebagai masyarakat kita dapat mengantisipasi resiko bencana kebakaran hutan di lapangan.

Melalui program *Tiger Challenge*, *Greenpeace* berupaya mengajak para perusahaan konsumen global untuk turut serta menjaga hutan di Indonesia dengan menantang keterlacakan rantai pasokan kelapa sawit yang mereka dapatkan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Greenpeace Indonesia, Kepo Hutan: Lindungi Hutan dengan Keterbukaan Informasi, Op.Cit.*

apakah sudah terbebas dari kerusakan hutan. Apabila perusahaan-perusahaan ini mampu menekan para pemasok minyak kelapa sawit hingga ke tingkat perkebunan agar menerapkan proses sesuai standar dengan tetap menjaga habitat hutan, maka hal ini juga dapat mengurangi tingkat kerusakan hutan dan juga satwa. Sedangkan melalui upaya pendekatan HCS, *Greenpeace* mencoba untuk melakukan pencegahan dengan menerapkan tata cara perencanaan konservasi dan pembukaan lahan agar dapat digunakan sesuai dengan level vegetasi yang penyimpanan stok karbonnya berbeda-beda.

Berdasarkan peran dalam mitigasi tersebut *Greenpeace* sebagai NGO dengan cakupan internasional juga memainkan peran sebagai NGO advokasi yang bertujuan untuk mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan publik melalui peluncuran program Kepo Hutan dan *Tiger Challenge*. Melalui program peluncuran peta interaktif ini *Greenpeace* berusaha untuk mempengaruhi agar kebijakan Satu Peta yang dicanangkan oleh Pemerintah sejak masa pemerintah Susilo Bambang Yudhono hingga Joko Widodo segera terealisasi agar dapat menuntaskan permasalahan dalam tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Sedangkan melalui program *Tiger Challenge*, *Greenpeace* mencoba untuk mempengaruhi agar aktivitas-aktivitas pengelolaan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan terhindar dari pengrusakan hutan.

Sementara dalam fungsi NGO operasional yang berkaitan dengan pengimplementasian aksi nyata untuk mengubah kondisi lingkungan hidup melalui program peluncuran *toolkit* pendekatan *High Carbon Stock* (HCS). Hal ini dikarenakan melalui program ini berupaya agar melalui tata cara yang digunakan

dalam pembukaan lahan dan juga konservasi lahan yang telah menjadi metode global dalam prakteknya dapat meminimalisir deforestasi hutan yang terjadi di Indonesia tiap tahunnya.

